

PRICE INTERVENTION TERHADAP KESETARAAN HARGA (THAMAN AL-MITHL) PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM

Syahpawi

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

Konsep keadilan harga (thaman al-mithl) dalam perspektif Barat sangat berbeda dengan sistem Islam. Islam memandang keadilan harga ditentukan oleh dua faktor: berdasarkan hukum tabi'i dan hukum syari'i. Hukum tabi'i harga sesuai dengan penawaran dan permintaan sedangkan hukum syari'i harga diperlu pengawasan dari pemerintah sebagai pengontrol harga di pasaran jika terjadi kezaliman. Sedangkan perspektif Barat hanya bertitik tolak pada kesepakatan para pihak dalam penentuan harga.

This article discuss concept the price of marketing in Islam (dhaman al-mithl) what consisted of antecedent, understanding, market price mikanism, price pixing in marketing, governmental convoy and conclusion. This study concludes concept the price of in conventional hardly differs from system done by Islam. Islam looks into the price of marketing determind by two factors: based on tabii law and syari'i law. Tabii law as according to offer and request while punishing syari'i the importance of there are observation from government as control the price of in marketing if happened brutality.

Kata Kunci: Keadilan, Harga, Islam

Pendahuluan

Harga pasaran bersumber pada proses bagaimana harga pasaran ditentukan. Harga dianggap penting dalam proses jual beli karena berfungsi sebagai isyarat dan insentif kepada konsumen dan produsen. Misalnya harga suatu barang akan mengalami kenaikan, maka akan memberi insentif kepada konsumen untuk mengambil alternatif kepada barang yang lebih murah. Sebaliknya, kenaikan harga mendorong kepada produsen untuk meningkatkan produksinya.

Dalam pandangan Islam harga merupakan rukun dari jual beli, jual beli dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu adanya penjual, pembeli, harga dan akad persetujuan. Islam memandang bahwa penetapan harga merupakan hak bagi perilaku pasar, dimana pada dasarnya harga berjalan sesuai dengan permintaan dan penawaran, hal ini berlaku apabila pasar dalam keadaan normal, maka akan berlaku kesetaraan harga (*thaman al-mithl*).

Perlakuan yang tidak adil dalam pasaran akan membawa kepada ketidakadilan dalam pasaran sehingga akan terjadi ketimpangan harga, kejadian seperti ini akan mengundang pemerintah untuk berperan aktif dalam menentukan harga pasaran. Hal ini terjadi jika kenaikan harga disebabkan penahanan dan

keengganan pedagang untuk menjual barangan dagangannya atau kerana terwujudnya praktek monopoli pada sesuatu barangan, untuk itu harga mesti diawasi supaya penjual dapat menjual pada harga yang lebih wajar, pendapat ini didukung oleh Imam Malik, Ibn Taimiyah, Al-Ghazali dan Al-Mawardi.

Dalam keadaan normal, pengawasan harga tidak dibenarkan oleh syara'. Nabi pernah menolak permintaan penduduk Madinah untuk campur tangan bagi mengatasi kenaikan harga. Fuqaha juga menilai bahwa larangan penetapan harga ini hanya berlaku bagi pasar dalam keadaan normal saja. Diambilnya pengawasan pemerintah dalam menetapkan harga bertujuan untuk mengatasi terjadinya kezaliman di pasar supaya terjadinya harga pasaran yang setara (*thaman al-mithl*).

Pengertian Harga dan Kesetaraan Harga

Dalam konsep yang paling sederhana harga adalah persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga.¹ H.H. Liebhafsky Jur, mengatakan bahwa teori harga didefinisikan adalah satu artian terbatas yang diberikan kepada perkataan atau lambang.²

Abu Yusuf juga memberi pengertian terhadap harga, ia mengatakan bahwa harga adalah *suatu ketetapan untuk menentukan tinggi atau rendahnya suatu barang*.³ Di samping itu dalam teori konvensional harga juga diartikan sebagai *mencerminkan kepada nilai faedah marginal yang diperoleh daripada sesuatu barang*.⁴

Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa Arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini, antara lain: *si'r al mithl*, *thaman al mithl* dan *qimah al adl*. Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah s.a.w dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al adl* (*Sahih Muslim*).

Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik (Ibnu Hanbal).

¹William A. McEachern, 2001. *Economics: A Contemporary Introduction*, (South-Western College Publishing : Division of Thomson Learning), hal. 3.

²H.H. Liebhafsky, Jur, 1963. *The Nature of Price Theory*, (Texas : The Dorsey Press), hal. 4

³Abu Yusuf tercatat sebagai ulama yang pertama membincangkan mekanisme pasar, misalnya ia memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Pemahaman saat ini mengatakan bahawa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan naik dan bila banyak barang maka harga akan turun. Pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitis hanya memperhatikan kurva permintaan sahaja. Lihat Abu Yusuf, 1979. *Al-Kharaj*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah), hal. 48

⁴Semakin tinggi faedah marginal (kerelaan membayar untuk tambahan satu unit barang), maka semakin tinggi harga yang rela dibayar oleh pengguna. Berdasarkan hukum faedah marginal berkurangan, faedah marginal adalah lebih tinggi bila jumlah barang yang digunakan itu sedikit. Lihat Radiah Abdul Kader, 2001. *Ekonomi Islam*, (Kuala Lumpur : Univision Press), hal. 70-71.

Meskipun istilah-istilah di atas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan KhulafaurraSyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu *'iwad al mithl* (equivalen *compensation*/kompensasi yang setara) dan *thaman al mithl* (equivalen *price*/harga yang setara).

Dalam *al Hisbah-nya* ia mengatakan: “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al adl*). Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil.

Harga yang Adil dalam Sejarah Pemikiran Barat

Penulis Jerman Rudolf Kaulla menyatakan, “Konsep tentang *justum pretium* (harga yang adil) muncul pertama kali di Roma, dengan latar belakang pentingnya menempatkan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim, di mana dengan tatanan itu dia menetapkan nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa. Pernyataan ini hanya menggambarkan sebagian dari bagaimana cara harga dibentuk dengan pertimbangan etika dan hukum.

Pada masa itu etika merupakan bagian dari filsafat sehingga doktrin tentang harga juga bagian dari sistem filsafat itu. Dalam operasionalnya, penciptaan harga harus memanfaatkan otoritas penguasa melalui pendekatan hukum. Untuk mencapai harga yang adil maka penguasa pada akhirnya seringkali mengeluarkan kebijakan penetapan harga. Harga dibentuk lebih dengan pertimbangan keadilan daripada pertimbangan ekonomi.

Ilmuwan pada abad pertengahan yang pemikirannya tentang harga banyak menjadi pijakan pemikiran di masa berikutnya adalah St Thomas Aquinas⁵. Tanpa secara eksplisit menjelaskan definisi harga yang adil Aquinas menyatakan, “sangat berdosa mempraktekkan penipuan terhadap tujuan penjualan sesuatu melebihi dari harga yang adil, karena itu sama dengan mencurangi tetangganya agar menderita kerugian. Aquinas mengutip pernyataan Cicero: “seluruh muslihat, tentu saja, tidak bisa dieliminasi dari perjanjian, hingga penjual tak bisa memaksa seseorang untuk menawar dengan harga lebih tinggi. Juga, tak bisa pembeli memaksa untuk membeli dengan harga yang lebih rendah”. Ia juga menyatakan, “harga yang adil itu akan menjadi salah satu hal yang tak hanya dimasukkan dalam perhitungan nilai barang yang dijual, juga bisa mendatangkan kerugian bagi penjual. Dan juga, suatu barang bisa dibolehkan secara hukum dijual lebih tinggi ketimbang nilainya sendiri, meskipun nilainya tak lebih dibanding harga

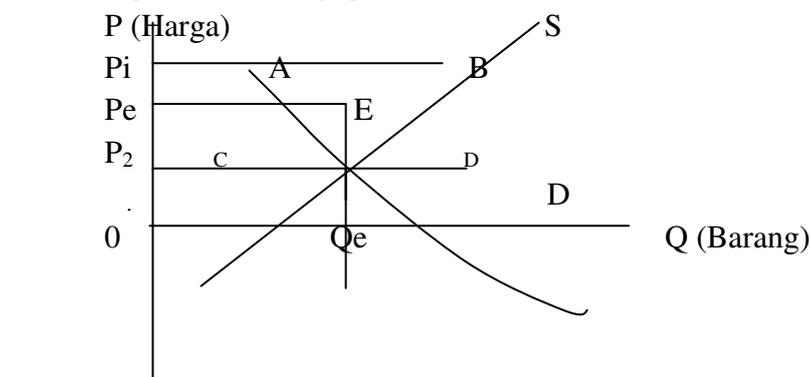
⁵ Menurut O'Brien (1920, h. 18), “kajian Aquinas tentang masalah ekonomi terus menerus menjadi dasar pijakan bagi seluruh penulis sampai akhir abad ke 15. Pendapatnya tentang berbagai point, memperkeras dan menjelaskan terhadap para penulis kemudian untuk mengembangkan lebih detail ketimbang hasil kerjanya...”

dari pemiliknya”. Dari beberapa pernyataan ini nampak jelas pendekatan etika dan hukum yang digunakan oleh Aquinas dalam menganalisis harga⁶.

Sebenarnya, juga terdapat ilmuwan yang telah menganalisis harga dari sisi ekonomi sebelum Aquinas, yaitu Albertus Magnus (1193-1280). Ia berpendapat, “dua barang dagangan sama dalam nilainya dan nilai tukarnya akan menjadi adil bila dalam produksinya menunjukkan persamaan biaya buruh dan pengeluaran lainnya”. Sayangnya, Magnus tidak memberi definisi yang rinci tentang biaya ini, kecuali hanya menekankan pada evaluasi atau *conditio* atau status sosial : adil, sebagai hasil kerja perorangan tergantung pada kelasnya, jadi pada nilai dari jasa-jasanya.

Pada teori lain transaksi pasar terjadi apabila kedua belah pihak di pasar telah mencapai suatu persetujuan mengenai tingkat *harga* dan *barang* dari transaksi tersebut. Sebelum ada persetujuan antara kedua belah pihak tersebut, tidak akan terjadi transaksi. Persetujuan ini tercapai apabila apa yang dikehendaki pembeli sama dengan apa yang dikehendaki penjual. Secara grafik, persetujuan ini tercapai apabila *keluk permintaan berpotong dengan keluk penawaran*, sebab hanya pada posisi inilah apa yang dikehendaki pembeli sama dengan apa yang dikehendaki penjual.⁷

Persetujuan tercapai pada posisi E dengan harga transaksi P dan barang transaksi Q. Transaksi terjadi : pembeli membayar kepada penjual dengan harga P per unit barang dan penjual menyerahkan sebanyak Q unit. Posisi ini diberi nama posisi *keseimbangan pasar* atau *equilibrium pasar*. Disebut posisi “**keseimbangan**” kerana pada harga tersebut, jumlah yang diinginkan dibeli konsumen sama dengan jumlah yang ingin dijual oleh produsen, tidak ada kelebihan ataupun kekurangan barang. Disebut posisi “keseimbangan” ini juga kerana ciri yang lain, yaitu bahawa pada posisi ini tidak ada kecenderungan bagi tingkat harga maupun transaksi barang untuk berubah kecuali, tentu sahaja apabila keluk D dan S itu sendiri berubah posisinya, dan ini bererti bahawa posisi keseimbangan itu sendiri juga berubah.⁸

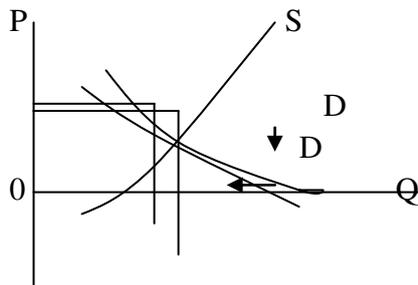


⁶ Salin dalam tulisannya pada *Encyclopedia of Social Science* memberikan komentar yang berbeda tentang pemikiran Thomas Aquinas ini, yaitu: “... tidaklah benar untuk mengatakan bahwa harga yang adil yang diformulasikan oleh Aquinas dan kemudian diikuti oleh para sarjana sama sekali tidak memiliki kandungan ekonomis” (Islahi, 1996).

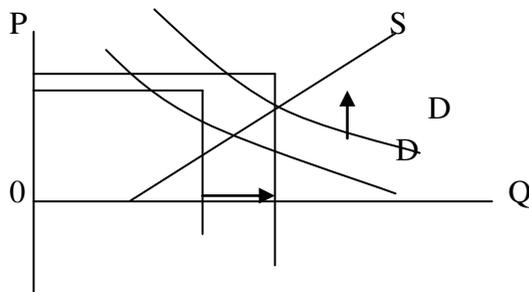
⁷ Boediono, 2000. *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta : BPFE), hal. 45

⁸ *Ibid.*, hal. 45

Di Barat, seperti kata Schumpeter⁹, sebelum pertengahan abad ke-18 tidak banyak diketahui tentang teori mekanisme harga. Dalam teori ekonomi konvensional, harga bagi pengguna mencerminkan nilai manfaat¹⁰ perbedaan yang diperolehi daripada sesuatu barang. Semakin tinggi perbedaan manfaat (kerelaan membayar untuk tambahan satu unit barang), maka semakin tinggi harga yang rela dibayar oleh pengguna. Berdasarkan hukum perbedaan manfaat berkurangan, perbedaan manfaat adalah lebih tinggi bila jumlah barang yang digunakan itu sedikit. Oleh sebab itu, bila kuantitas yang digunakan sedikit pengguna yang rela membayar harga yang tinggi. Kerelaan membayar berkurangan bila kuantitas yang digunakan bertambah. Fenomena ini yang ditunjukkan oleh keluk permintaan pengguna yang bercerun negatif.



Bagi pengeluar pula, harga mencerminkan harga modal sesuatu barang. Semakin banyak kuantitas yang hendak ditawarkan, semakin tinggi perbedaan harga yang akan terlibat. Oleh karena itu pengeluar hanya akan menambah kuantitas yang ditawarkan jika harga barang meningkat dan ini ditunjukkan oleh penawaran yang bercerun ke atas dari kiri ke kanan.



Harga keseimbangan pasaran ditentukan melalui proses tawar-menawar antara pengguna dan pengeluar dan tercapai apabila kuantiti yang sanggup diminta oleh pengguna bersamaan dengan kuantiti ini nilai perbedaan manfaat pengguna bersamaan dengan perbedaan harga modal. Bila harga berada pada keseimbangan tiada tekanan untuk ia turun atau naik.

⁹J.A. Schumpeter, 1972. *History of Economics Analysis*, (Landon : George Allen and Unwin Ltd), hal.

¹⁰Faedah boleh ditakrifkan sebagai bayaran yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman ke atas modal yang digunakan. Bayaran tersebut boleh dilihat sebagai bentuk sewaan yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman, sebagai gantirugi ke atas kehilangan modal yang boleh digunakannya semasa modal itu dipinjamkan kepada peminjam tersebut. Lihat Stephen G. Kellison, 1989. *The Theory of Interest*, Penterjemah Zein Isma Ismail, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka), hal. 1.

Harga keseimbangan menimbulkan kesamaan dalam kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan. Perlu diingatkan bahwa harga keseimbangan mempunyai dua ciri-ciri penting :

1. Mereka adalah harga-harga yang secara spontan akan menimbulkan dirinya melalui tindakan kuasa permintaan dan penawaran.
2. apabila tertumbuh, mereka akan teguh kecuali kuasa-kuasa permintaan dan penawaran sendiri berubah.¹¹

Operasi hukum permintaan dan penawaran yang menyatakan bahawa *harga suatu barangan ekonomi cenderung mengghala ke titik di mana permintaan berkesan terhadapnya menyamai penawaran.*¹²

Pengunaan perkataan *cenderung* di dalam kenyataan hukum adalah penting. Hukum tersebut tidak mengatakan bahawa sesuatu harga *akan sentiasa* berada di titik keseimbangan. Apa yang disebut ialah bahawa kuasa-kuasa permintaan dan penawaran bekerja kearahnya. Perlu diingat bahwa hidup bukanlah di dalam dunia yang statis, tanpa perubahan di mana syarat-syarat permintaan dan penawaran adalah stabil.

Kesamaan penawaran dan permintaan adalah satu-satunya syarat keseimbangan yang diperlukan untuk terciptanya posisi keseimbangan¹³, namun masih ada suatu syarat tambahan yang harus dipenuhi agar supaya keseimbangan itu merupakan keseimbangan yang stabil, yaitu keseimbangan kearah mana nilai daripada variabel-variabel cenderung untuk kembali setelah terjadi suatu penyimpangan kecil.

Menurut Walras, keseimbangan itu akan stabil jika disebelah *kiri* titik keseimbangan, misalnya titik B jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah yang diminta, dan jika disebelah *kanan* titik keseimbangan, jumlah yang diminta lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan.¹⁴

Artinya pada tingkat harga yang *lebih tinggi* daripada harga keseimbangan, *para penjual akan menawarkan jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang hendak dibeli oleh pembeli*, hal ini akan mendorong harga turun sampai tingkat keseimbangan, dan pada tingkat harga yang *lebih rendah* daripada harga keseimbangan, *para pembeli bersedia membeli jumlah yang lebih besar*

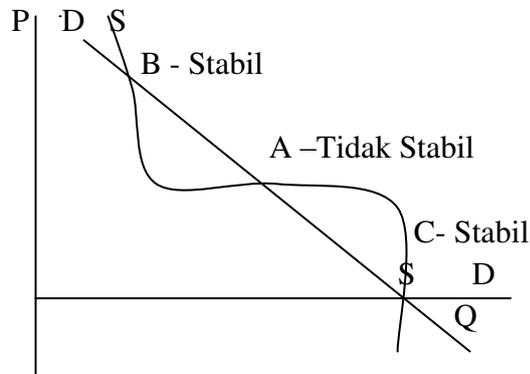
¹¹Marcharan Singh Khera, 1978. *Mikro ekonomi: Prinsip-prinsip dan Aplikasi-aplikasi*, (Kuala Lumpur : Khera), hal. 117.

¹²*Ibid.*, hal. 117

¹³J. R. Hicks, 1946. *Value and Capital*, (Oxford : Oxford University Press), Bab V, 63-64 ; Paul A. Samuelson, *The Stability of Equilibrium: Comparative Statics and Dynamics*, *Econometrica*, Vol. IX (1941), hal. 103.

¹⁴Leon Walras, *Elements of Pure Economics*, terjemahan William Jaffe, (Homewood, III: Richard D Irwin, Inc, 1954, hal. 109, dalam diagram Walras sendiri, sumbu harga dan sumbu jumlah adalah kebalikan daripada yang digambarkan dalam gambar, dan dengan demikian dalam menjelaskan diagramnya ia membalik penggunaan istilah *kiri* dan *kanan* dari yang dipergunakan dalam teks di atas.

daripada jumlah yang hendak *ditawarkan* oleh *para penjual*, hal ini mendorong *harga naik* sampai ketinggian keseimbangan.¹⁵



Dalam gambar di atas keseimbangan adalah stabil pada titik B dan titik C, tetapi tidak stabil pada titik A. Terjadinya gangguan pada titik A akan mengakibatkan pergeseran kepada posisi keseimbangan baru yang stabil, baik pada titik B maupun pada titik C.

Penetapan Kesetaraan Harga Perspektif Islami

Penentuan harga pasaran dari perspektif Islam tunduk kepada hukum *tabi'i* dan hukum *syari'i*. Dari sudut hukum *tabi'i*, penentuan harga pasaran adalah urusan Allah; yang dimaksud ia tunduk kepada faktor *tabi'i* yang mempengaruhi permintaan pengguna dan penawaran pengeluar. Seperti dalam teori ekonomi barat, Islam mengakui bahwa harga keseimbangan pasaran ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang masing-masing mencerminkan nilai perbedaan manfaat penjual dan pembeli.

Oleh karena itu jika permintaan melebihi penawaran, Islam mengakui perbedaan manfaat pengguna melebihi perbedaan harga modal dan harga akan naik. Sebaliknya, jika permintaan kurang daripada penawaran harga akan turun. Islam juga mengakui hukum *tabi'i* dimana harga keseimbangan tercapai bila kuantitas diminta bersamaan dengan kuantitas ditawarkan.

Di samping hukum *tabi'i*, penentuan harga keseimbangan dalam Islam juga berdasarkan kepada hukum *syari'i* yang menjamin keadilan. Harga yang adil tercapai apabila tidak berlaku kezaliman atau pengambilan hak orang lain.

Keadilan yang dituntut dalam pasaran dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

Surat 6 : 152

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

“Dan sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil”.

Surat 7 : 85

فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس

¹⁵H.H. Liebhafsky, 1963. *The Nature of Price Theory*, terjemahan P. Sitohang, Hakekat Teori Harga, (Homewood : The Dorsey Press), hal. 231

“Sempurnakanlah sukatan dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan hak manusia”.

Surat 17 : 35

وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم

“Kamu sempurnakanlah sukatan bila kamu menyukat dan timbanglah dengan timbangan yang betul”.

Kemudharatan kepada orang lain perlu diwaspadai jika keadilan hendak ditegakkan. Ini kerana kemudharatan akan menghalang orang yang berhak daripada mendapatkan haknya. Jika harga pasaran yang ditentukan oleh hukum *tabi'i* meningkat sedangkan tidak berlaku sebarang ketiadaadilan dalam pasaran maka harga tersebut adalah adil dalam pandangan Islam. Ini kerana harga keseimbangan ini telah dicapai secara *tabi'i* mengikut ketentuan Allah. Oleh hal itu pemerintah tidak harus campur tangan mengawal kenaikan harga tersebut. Berbuat demikian adalah bertentangan dengan ketentuan Allah dan mungkin akan menimbulkan kemudharatan kepada pihak tertentu.

Islam sangat menitikberatkan tentang persoalan keadilan yang bertentangan dengan perbuatan kezaliman, dimana ia memberi hak kepada mereka yang berhak. Al-Qur'an sendiri menekankan beberapa kali berkenaan dengan persoalan keadilan.¹⁶

Dalam bidang ekonomi juga konsep ini amat penting. Ibn Khaldun dalam kitabnya “*Muqaddimah*”, menyatakan, keadilan adalah asas dalam ekonomi, sekiranya keadilan tidak wujud sebuah negara akan terpecah. Begitu juga Ibn Qayyim menyatakan keadilan sebagai objek utama syari'ah. Jika tidak ada keadilan keberkatan dan kewajaran akan bertukar menjadi kejahatan dan kecelakaan.¹⁷

Konsep keadilan harga telah ditekankan sejak zaman Rasulullah dimana ia disebut dalam konteks pampasan (ganti rugi). Sebagai contoh dalam suatu peristiwa seorang pembesar telah membebaskan seorang hamba.¹⁸ Hamba tersebut kemudian bebas dan pembesar tersebut telah diberikan pampasan pada suatu harga yang setara.

Memandangkan tanggapan tentang harga yang adil telah ada sejak bermulanya tamadun (peradaban) Islam, selain daripada Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah adalah pemikir Islam yang pertama yang memberikan penekanan yang terperinci mengenai keadilan harga ini. Begitu juga beliau tidak menggunakan istilah harga yang adil sebaliknya adalah harga yang *setara* (**thaman mithl**).¹⁹

¹⁶Abdul Hasan M. Sadeq, et.al, Abdul Azim Islahi, 1992. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, dalam “Reading in Islamic Economic Thought”, (Malaysia : Shah Alam Longman), hal. 120

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Abdul Azim Islahi, *op.cit.*, hal. 120

¹⁹Monzer Kahf, *The Economic Views of Ibn Taimiyah*, dalam “al-Ittihad, July-September 1981, Vol. 18. No 5, hal. 11

Menurut beliau harga suatu barang adalah setara jika harga yang dikenakan adalah sama dan setara dengan harga barang lain yang sama sifat-sifatnya dalam pasaran pada masa dan juga tempat yang sama, contoh perusahaan A menjual gula dengan harga Rp.5.000/kg maka perusahaan B juga harus menjual gula dengan harga Rp.5.000/kg yang sejenis dan setara mutunya. Barang yang sejenis inilah disebut dengan *al-mithl*.²⁰

Keadilan harga didefinisikan oleh pemikir-pemikir Islam yang awal sebagai harga yang sama dengan barang-barang yang sama di tempat lain dalam pasaran. Inilah sebab mengapa mereka menggelar keadilan harga sebagai harga yang sama (*Thaman al-Mithl*).

Dalam sejarah pemerintahan Rasulullah saw baginda pernah diminta supaya mengawal harga. Peristiwa itu telah diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Abu Daud yang bermaksud :

“Pernah berlaku kenaikan harga barang di Madinah. Seorang penduduk telah datang merayu kepada Rasulullah, “Ya, Rasulullah, kawalkanlah harga” kemudian datang seorang lain merayu perkara yang sama. Rasulullah telah menjawab dengan tegas, “oh, tidak sesungguhnya Allah sahaja yang menaikkan dan menurunkan harga dan yang memberikan rezeki. Aku lebih suka menemui Allah dengan tidak seorang pun antara kamu mengadu aku telah berlaku zalim terhadap darah dan hartanya”.

Dalam peristiwa ini Rasulullah saw tidak melakukan pengawal harga kerana beliau tahu bahawa kebanyakan barang yang dijual adalah barangan import. Kenaikan harga disebabkan harga barang import yang mahal, dan bukan disebabkan oleh tindakan penjual yang sengaja menaikkan harga di pasaran. Jika Rasulullah saw menggunakan pengawasan harga, mungkin akan merugikan penjual yang telah membayar harga yang tinggi untuk mendapatkan bahan baku. Pengawasan harga akan menyebabkan kekurangan bahan baku dalam pasaran dan ini akan memburukkan keadaan.

Perkara di atas telah dijelaskan oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Al-Hisbah fil Islam*, yang maksudnya seperti berikut: *“Kenaikan dan kejatuhan harga bukan selalu berpunca daripada kezaliman sesetengah manusia. Kadangkala ianya disebabkan oleh kekurangan pengeluaran dan kejatuhan jumlah barangan import untuk penggunaan masyarakat. Dengan itu sekiranya permintaan ke atas barangan meningkat manakala penawaran mengalami kejatuhan, maka harga akan naik. Begitu juga sebaliknya, apabila penawaran barangan meningkat, dan pada masa yang sama permintaan menurun, harga akan jatuh. Kekurangan dan kelebihan ini bukan semestinya berasal dari perbuatan manusia. Ianya mungkin disebabkan oleh keadaan yang bebas dari*

²⁰Mustafa Ahmad az-Zarqa', 1946. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, (Beirut : Dar al-Fikr), Jilid III, hal. 132-137, dan lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, 50-51

*factor kezaliman tetapi memang kadang-kadang ada juga kemungkinan disebabkan kezaliman. Hanya Allah swt yang Maha Mengetahui”*²¹

Menurut Ibn Taimiyah kezaliman yang menyebabkan perubahan harga meliputi suatu bentuk penyelewengan yang sengaja dilakukan oleh mana-mana pihak supaya harga memihak kepada mereka. Salah satu contoh tindakan monopoli (*ikhtikar*), yaitu perbuatan menyembunyikan atau menahan barang sehingga terjadi kenaikan penawaran dalam pasaran yang akan menyebabkan harga naik.

Larangan monopoli dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw yang bermaksud: “*Barangsiapa menyembunyikan barang dengan tujuan melipatgandakan harga ke atas orang lain adalah satu kesalahan*”. (H.R. Bukhari)

Dalam kitabnya yang berjudul *Fatawa*, Ibn Taimiyah telah menggariskan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan seterusnya harga. Walaupun beliau tidak menggunakan istilah ekonomi modern tetapi konsep yang disampaikan menyamai konsep faktor permintaan yang difahami hari ini seperti berikut :

- a. Kehendak manusia (*Al-Raghabah*), faktor ini dikenali sebagai citarasa dalam ekonomi konvensional. Menurut Ibn Taimiyah, kehendak manusia senantiasa berubah-ubah bergantung kepada sama ada jumlah barang itu banyak atau sedikit. Jika jumlahnya sedikit maka ia lebih dikehendaki dan ini menyebabkan harga naik dan sebaliknya bila jumlah banyak maka berlaku penurunan harga. Pendapat Ibn Taimiyah ini sesuai dengan konsep utility marginal berkurangan dalam ekonomi barat.
- b. Jumlah pembeli (*Al-Tullah*), menurut Ibn Taimiyah, jika bilangan pembeli sesuatu barang itu banyak, harga akan naik dan jika jumlah pembeli berkurang maka harga akan turun. Faktor ini menunjukkan kepada faktor jumlah penduduk dalam teori permintaan konvensional.
- c. Nilai keperluan sesuatu barang, sesuatu barang yang lebih banyak digunakan pada suatu masa akan mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi berbanding dengan masa ia kurang diperlukan.
- d. Jual beli tunai atau hutang, penjual boleh mengenakan harga yang lebih tinggi ke atas pembelian secara hutang berbanding dengan jual beli tunai. Ini kerana adanya risiko kerugian yang ditanggung penjual jika pembeli tidak membayar hutangnya.
- e. Latar belakang pembeli, harga jualan secara hutang juga berbeda mengikut perbezaan latar belakang pembeli. Jika pembeli itu dikenali sebagai seorang yang jujur dan sentiasa membayar hutangnya, maka beliau akan diberikan harga hutang yang lebih murah. Harga yang lebih tinggi diberikan kepada pembeli yang selalu gagal atau lambat membayar hutangnya.

²¹Saiful Azhar Rosly & Anwar Ahmad, 1991. *Pengurusan Perniagaan Islam*, (Shah Alam : tp), hal. 74

- f. Jenis mata uang yang digunakan. Jika mata uang yang biasa digunakan oleh orang ramai, harga yang dikenakan oleh penjual adalah lebih rendah berbanding dengan pembayaran yang menggunakan mata uang yang jarang digunakan.

Ibn Taimiyah juga menyatakan bahwa kenaikan harga yang disebabkan kekurangan barang atau penambahan penduduk adalah kehendak Allah. Ia juga mendukung pengawasan harga dalam keadaan pasaran yang tidak sempurna dan menentangnya jika pasar sempurna, walaupun harga meningkat.²²

Al-Ghazali juga berpendapat bahwa:

“...Apabila petani yang membawa bijian tidak menemui orang yang berkendakkannya, maka ia terpaksa menjual harga yang murah kepada saudagar-saudagar untuk tujuan disimpan sehingga wujud keperluan orang terhadap barang tersebut”.²³

Ibn Khaldun mengakui pengaruh penawaran dan permintaan dalam menentukan harga-harga di pasaran.²⁴ Ini sesungguhnya mengesankan kerana peran penawaran dan permintaan dalam menentukan nilai belum dikenal benar di Barat hingga abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang lalu.

Ibn Khaldun menekankan bahwa peningkatan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan dalam harga, sebaliknya suatu penurunan atau peningkatan dalam penawaran akan menimbulkan penurunan dalam harga. Ia percaya bahwa *“harga-harga yang terlalu rendah”* akan merugikan perajin dan pedagang dan akan mendorong mereka keluar dari pasar, sebaliknya harga-harga *“yang terlewat tinggi”* akan merugikan konsumen.

Ia juga mengatakan bahwa harga yang stabil adalah antara dua kondisi tersebut merupakan titik harga yang diinginkan, kerana hal itu tidak saja memberikan tingkat keuntungan yang secara sosial dapat diterima oleh para pedagang, melain juga akan membersihkan pasar dengan mendorong penjualan dan pada gilirannya akan menimbulkan keuntungan dan kemakmuran yang besar. Miskipun demikian, harga-harga yang rendah tetap diinginkan bagi barang-barang

²²Abdul Azim Islahi, 1985., “Ibn Taimiyah’s Concept of Market Mechanism”, *Jurnal of Research in Islamic Economics*, Jil. 2, Bil. 2, hal. 57

²³Al-Ghazali, 1980. *Ihya Ulumiddin*, Jil.5, (Indonesia : Manara Kudus), hal. 89.

²⁴Sebelum Ibn Khaldun, para Ulama lainnya juga telah mengatakan peranan penawaran dan permintaan dalam menentukan harga. Umpamanya, Ibn Taimiyah menulis, “naik atau turunnya harga tidak semata-mata kerana ketidakadilan yang dilakukan orang. Hal ini disebabkan kelangkaan *output* atau impor komoditas yang laku. Jika permintaan terhadap suatu komoditas meningkat sementara penawaran komoditas yang diminta meningkat, maka harga akan naik. Jika permintaan menurun dan penawaran meningkat, maka harga akan turun”. (Ibn Taimiyah, *Majmu’atul Fatawa*, Vol. VIII, 523. Bahkan sebelum Ibn Taimiyah, al-Jahiz (w. 255/869) yang menulis kurang lebih lima ratus tahun sebelumnya bahawa, “Apa pun yang tersedia di pasar akan murah harganya kerana ketersediaannya dan mahal kerana kelangkaannya jika barang itu dibutuhkan” (At-Tabassur (1983), hal. 13, dan bahawa “barang yang penawarannya meningkat, harganya akan murah kecuali kecerdasan, yang menjadi lebih mahal manakala bertambah”, (*Ibid.*, h 13), lihat Umar Chapra, 2000. *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, (UK : The Islamic Foundation), hal.137.

kebutuhan pokok, kerana hal ini akan meningkatkan beban orang miskin yang merupakan mayoritas penduduk.²⁵

Jika menggunakan terminologi modern dalam melihat konsep Ibn Khaldun, dapat dikatakan bahwa Ibn Khaldun mendapatkan suatu tingkat harga yang stabil dengan suatu ongkos hidup yang relatif rendah sebagai pilihannya, dari sudut pandang pertumbuhan dan pemerataan dikaitkan dengan laju inflasi dan deflasi. Yang pertama merugikan pemerataan sementara yang kedua mengurangi insentif dan efisiensi. Harga-harga yang rendah untuk kebutuhan pokok harus dapat dicapai lewat penentuan harga oleh negara, hal ini akan menghancurkan insentif untuk produksi.²⁶

Ibn Khaldun, juga membincangkan soal pengaruh penawaran terhadap harga, beliau berkata :

*“...Apabila barangan yang dibawa dari luar sedikit dan berkurangan, harganya akan naik. Sebaliknya, apabila negeri itu berdekatan dan perjalanannya selamat, akan terdapat ramai peniaga yang akan mengangkut barang, oleh itu barang akan berlebihan dan harganya akan jatuh”.*²⁷

Faktor-faktor yang menentukan penawaran menurut Ibn Khaldun antara lain :

1. Permintaan
2. Laju keuntungan relatif
3. Jangkauan usaha manusia
4. Jumlah angkatan kerja dan pengetahuan serta keterampilan (skill).
5. Kedamaian dan keamanan
6. Latar belakang teknis dan pembangunan keseluruhan masyarakat.²⁸

Semua faktor ini sangat penting dalam teori produksinya. Jika harga-harga turun dan menimbulkan suatu kerugian, nilai modal akan terkena erosi, insentif untuk penawaran merosot dapat menyebabkan resesi. Konsekuensinya, perdagangan dan kerajinan akan dirugikan.

Sedangkan faktor yang menentukan permintaan adalah antara lain:

1. Pendapatan
2. Jumlah penduduk.
3. Kebiasaan dan adat masyarakat.
4. Pembangunan kesejahteraan umum dalam masyarakat.²⁹

Sekalipun Ibn Khaldun berjalan jauh di depan para ekonomi konvensional, barangkali dia tidak memiliki gagasan tentang diagram permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan dan penawaran, dan yang paling penting dari semuanya, *equilibrium* harga yang berperan sangat penting dalam analisis

²⁵Groenewegen, “A Note on the Origin of the Phrase, Supply and Demand”, *Economic journal*, June 1973.

²⁶Umar Chapra, *op.cit.*, hal. 138.

²⁷Abdul Azim Islahi, *op.cit.*, hal. 61

²⁸Umar Chapra, *op.cit.*, hal. 138

²⁹*Ibid.*

ekonomi moden. Namun begitu Ibnu Khaldun tidak menyebutkan tentang pengawasan harga. Dapat dikatakan bahwa pada umumnya, harga ditentukan oleh kuasa pasaran: permintaan dan penawaran, yang dalam Islam disebut sebagai ketentuan Allah.

Pengawasan Harga

Peranan pemerintah dalam sistem ekonomi barat adalah bersifat bermusim, yaitu bergantung kepada keperluan dan keadaan, sedangkan dalam ekonomi Islam pada umumnya bersifat alamiah, dasar dan tetap.³⁰ Hal ini berpedoman kepada firman Allah :

Surah 4 : 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ واطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulilamri di kalangan kamu” (al-Qur’an 4: 59).

Dalam ayat tersebut dapat dirumuskan bahwa pemerintah Islam adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan hukum Allah sesudah Rasul, dan ia terikat dengan peraturan-peraturan yang telah digariskan.

Dengan ini dapat dipastikan, bahwa pengawasan pemerintah Islam atas ekonomi Islam bersifat pengawasan konfrehensif untuk memastikan semua perniagaan berjalan mengikut prinsip perniagaan secara Islami.³¹ Dengan demikian jelaslah bahwa dalam konteks harga, peranan pemerintah bersifat sementara. Maksudnya, pemerintah ikut campur tangan jika terjadi kezaliman atau kecurangan berlaku di pasaran. Jika tidak, harga pasar akan menentukannya.³²

Ibnu Taimiyah membolehkan intervensi harga guna terjadinya kesetaraan dalam pasaran (*dhaman al-mithl*) pada keadaan tertentu, sepintas pendapatnya bertentangan dengan sikap Rasulullah yang menolak intervensi harga. Namun sebenarnya Ibnu Taimiyah menjabarkan hadis tersebut yaitu harga seharusnya terjadi secara rela sama rela pada saat penawaran bertemu permintaan. Bagi Ibnu Taimiyah intervensi harga dapat dibedakan menjadi dua,³³ intervensi harga yang zalim dan yang adil.

a. *Intervensi harga yang zalim.* Suatu intervensi harga yang dianggap zalim bila harga maksimum (*ceiling price*) ditetapkan dibawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Secara

³⁰Surtahman Kastin Hasan, 2001. *Ekonomi Islam Dasar dan Amalan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka), hal. 81

³¹AB. Rashid Bin Haji Dail, 1985. *Institusi Pasar Perniagaan Islam*, (Kuala Lumpur : Pustaka Rashfa dan Anak-anak), hal. 35.

³²Mannan, menambah dengan menegaskan bahawa harga yang wajar bukan merupakan konsensi, tetapi hak dasar yang boleh dikuatkuasakan dengan undang-undang oleh kerajaan.

³³Ibnu Taymiyah, 1976. *Al-Hisba*, (Cairo : Darul Sya’b), hal. 24

parallel dapat pula dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim.

- b. *Intervensi harga yang adil.* Suatu intervensi harga dianggap adil sepanjang tidak menimbulkan aniaya terhadap penjual maupun pembeli.

Menurut Ibnu Taimiyah ada beberapa kondisi yang mengharuskan pemerintah melakukan intervensi harga, yaitu :

- a. Produsen tidak ingin menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan seperti ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga (intervensi harga) yang adil.³⁴
- b. Produsen menawarkan barang pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan ini, pemerintah harus melakukan intervensi harga dengan mendorong konsumen dan produsen melakukan musyawarah untuk menentukan harga yang didahului dengan tindakan investigasi atas *demand, supply*, biaya produksi dan lainnya. Selanjutnya pemerintah menetapkan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.
- c. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak berkerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku (*the prevailing market price*), padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar (*reasonable price*) dan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya.³⁵

Inilah indahnya Islam, merintanginya seseorang masuk pasar (*entry barriers*) dilarang sehingga setiap bisnis yang mempunyai *positive economic profit* akan mengundang masuknya pemain baru sehingga *economic profit* turun menjadi nihil, dan sekedar mendapat laba normal saja.

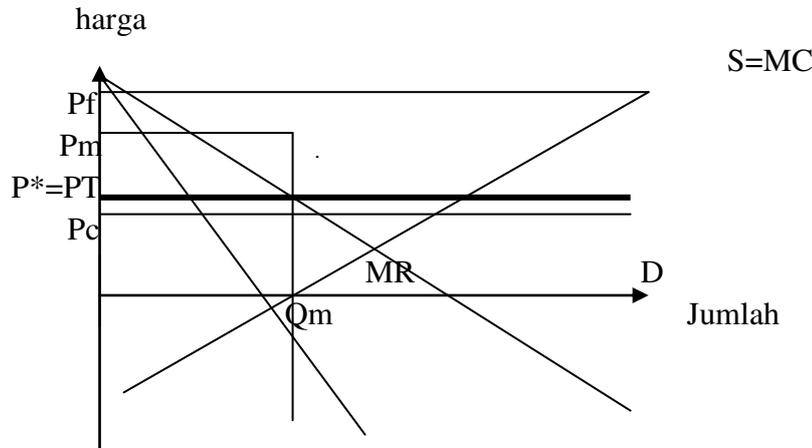
Pelarangan *entry barriers* ini tidak serta merta menjamin masuknya pemain baru sehingga produsen hanya mendapat normal profit. Dapat saja biaya investasinya yang besar atau teknologi yang tinggi yang menyebabkan pemain baru tidak dapat masuk pasar.³⁶ Bila ini terjadi, *natural monopolist* tetap sahaja tidak boleh menentukan harga yang berlebihan, dan untuk itu kerajaan melakukan intervensi harga yang mengacu pada harga umum berdasarkan harga lazim, atau harga yang ditetapkan dalam musyawarah, atau berdasarkan harga yang berlaku pada tingkat harga yang wajar.

³⁴Ibn Taimiyah berpendapat : “*Seorang penjual tidak boleh menjual barang dengan harga yang berlebihan kepada pembeli yang tidak mengetahui harga pasar, si penjual harus menjual pada harga yang lazim berlaku*” (the customary price)”, lihat Ibn Taimiyah, *Ikhtiyarat*, (Beirut : Darul Uraifah, tt), hal. 359-360

³⁵Adiwarman Karim, 2002. *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : The International Insitute of Islamic Thought Indonesia), hal. 144

³⁶Dalam ekonomi konvensional hal ini biasa digolongkan sebagai monopoli alami.

Jelaslah *Islamic price intervention* yang diusulkan oleh Ibn Taimiyah malah melindungi kepentingan penjual dan pembeli.



Secara grafis, Intervensi harga versi Ibnu Taimiyah ditetapkan pada saat *supply* bertemu *demand*, sehingga sebenarnya intervensi pasar ini malah mengembalikan harga pada harga keseimbangannya semula. Oleh kerana intervensi harga pasar Islami ini tidak akan menimbulkan *excess supply* atau *excess demand* sebagaimana yang terjadi pada intervensi pasar konvensional. Lebih jauh lagi, intervensi pasar Islami tidak akan menimbulkan *dead weight loss* sebagaimana yang terjadi pada intervensi pasar pada konvensional.

Dalam keadaan normal, pengawasan harga tidak dibenarkan oleh syara. Hal ini Nabi pernah menolak permintaan penduduk Madinah supaya baginda campur tangan demi mengelakkan kenaikan harga. Bukti ini jelas menunjukkan satu ketetapan hukum daripada Nabi yang perlu dipatuhi. Oleh kerana itu ada sebagian fuqaha mengharamkan penentuan harga dalam segala keadaan.³⁷

Islam memberi penekanan untuk mengenakan harga tertinggi jika ia memberikan kebajikan tambahan dan tidak menyebabkan kemudaratan sama ada kepada pengguna maupun pengeluar.

Imam al-Ghazali memberi pendapat bahwa Islam membolehkan menentukan harga tertinggi, jika ia memberikan faedah kepada masyarakat.³⁸ Pengertian yang sama dengan kawalan harga seperti yang diikuti oleh para pemimpin sebagai panduan yang betul dan kejayaan mereka semasa mereka memerintah.³⁹

Bila ketidakadilan mengambil alih dalam pasaran, pemerintah Islam mesti menstabilkan terhadap harga umum melalui harga tertinggi atau lain sebagainya. Peraturan harga harus melibatkan urusan perniagaan yang adil antara pembeli dan penjual dalam kematangan, bahwa mereka boleh dipaksa untuk menukarkan

³⁷M.A. Khan, 1982. "Appendix: *al-Hisba and the Islamic Economy*", dalm. Ibn Taimiyah, *Public Duties in Islam*, (Leicester : The Islamic Foundation), hal. 144.

³⁸Ramadhan Ali Al Syed al-Sharbanasi, 1404. *Hamayatul Mustahlik Fi al Fiqhul Islami*, (Qaherah : Maktabah al-Islamiyyah), hal. 64.

³⁹Abdullah Alwi Hj Hasan, 1986. *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial law*, (Dissertation, Inversity of Edinberg), hal. 60

kepada harga yang adil dan menghalang mereka daripada menerapkan bayaran yang lebih daripada pertimbangan yang adil.

Ketidakadilan pasaran dapat berlaku dalam banyak cara dimana kuasa pasaran gagal untuk beroperasi dengan bebas. Salah satunya adalah kewajiban kuasa monopoli pengerluaran dalam pasaran, yaitu dimana perusahaan pesaing ditahan daripada memasuki pasaran secara teknik atau menurut hukum.⁴⁰

Penutup

Berdasarkan uraian mengenai harga pasaran di atas maka dapat dikatakan bahwa, penilaian atas harga pasaran dalam Islam boleh dilakukan mengikut kepada prinsip syari'ah (*Qawaid Fiqiyah*). Dalam konteks ini, sekiranya berlaku pencegahan atau pertentangan di antara kemudaran dan manfaat, maka perlu dibuat pertimbangan mana yang lebih berat antara keduanya. Pasaran yang menimbulkan kemudaran pasaran harus dihindari atau perlu dihapuskan kecuali jika atas alasan *maslahah* maka harus dipilih pasaran yang mempunyai kemudaran yang minimum.

Pada dasarnya campur tangan pemerintah dalam pasaran tidak dibenarkan oleh Islam. Campur tangan pemerintah dalam pasaran lebih ditekankan agar jangan sampai terjadinya ketidakadilan demi untuk mencapai kesetaraan harga dalam pasaran (*thaman al-mithl*) sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah.

Harga pasaran dalam pandangan konvensional lebih menekankan kepada kekuatan *supply* dan *demand*, sebagai penentuan harga. Dalam teori konvensional harga bagi pengguna mencerminkan kepada nilai perbedaan manfaat yang diperolehi daripada suatu barang. Semakin tinggi nilai perbedaan manfaat, maka semakin tinggi harga yang rela dibayar oleh pengguna.

Keseimbangan pasaran ditentukan melalui proses tawar menawar antara pengguna dan pengeluar dan tercapai apabila kuantitas yang sanggup diminta oleh pengguna bersamaan dengan kuantitas yang sanggup ditawarkan oleh penjual. Pada kuantitas ini nilai perbedaan manfaat pengguna bersamaan dengan harga marginal pengeluar. Bila harga berada pada keseimbangan tiada tekanan untuk ia turun atau naik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mahdzan Ayob, 2001. *Teori Mikroekonomi*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Anwar, Muhammad, 1987. *Modelling Interest: Free Economy : A study in Macroeconomics and Development*, Virginia: the International Institute of Islamic Thought.
- Aidit Ghazali, 1986. *Pengeluaran*, Peteling jaya kertas kerja.

⁴⁰Walter Nichalson, 1985. *Microeconomic Theory*, (The Dryden Press), hal. 417-420.

- Chapra, M. Umar, 1970. *The Economic System of Islam*, Landon : Islamic Cultural Centre.
- Choudhury, M. A., 1986. *Contributions to Islamic Economic Theory: A Study In Social Economics*, Hong Kong : The MacMillan Press.
- F. Machlup, 1952. *The Political Economy of Monopoly*, Baltimore : Yhe John Hopkins Press.
- Khera, Marcharan Singh, 1978. *Mikroekonomi : Prinsip- Prinsip dan Aplikasi- Aplikasi*, terjemahan Mohd. Kaus Tajuin, Kuala Lumpur : Khera SDN BHD.
- Kahf, Monzer, 1973. *A Contribution to the Study of the Economics of Islam*, Amerika Syarikat : mimeo Universiti of Utah.
- Liebhafsky, H.H., 1963. *The Nature of Price Theory*, Homewood Texas : The Dorsey Press.
- Marshall, Alfred, 1938. *Principles of Economics*, Landon: Macmillan dan Co Ltd.
- Rahman, Afzal Ur, 1985. *Economic Doctrines of Islam*, Lahore : Islamic Publication Ltd.
- Sadono Sukirno, 2002. *Mikroekonomi*, Kuala Lumpur : Aneka Peblishing.
- Siddiqi, M.N, 1979. *The Economic Enterprise in Islam*, Lahore : Islamic Publications Ltd.
- Siddiqui, 1981. *Muslim Economic Thinking*, Leicester : The Islamic Foundation.
- Siddiqui, M. N., 1979. *The Economic Enterprise in Islam*, Lahore : Islamic Publications Ltd.
- S.K. Hasan, 1990. *Masalah Ekonomi dan Alam Sekitar: Penyelesaian Islam*, Bandar Baru Bangi: Karyawan.
- Turvey, Ralph, "On Divergences Between Social Cost and Private Cost", *Economica*, Ogos 1963.